

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

□ Kabupaten Bogor bukan merupakan daerah yang masuk kedalam penghitungan IHK di Jawa Barat. BPS Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Bappedalitbang hanya menghitung inflasi sampai dengan Bulan September 2019, sedangkan dari Bulan Oktober 2019 s/d Bulan Nopember 2020 tidak menghitung inflasi, sehingga TPID Kabupaten Bogor terkait inflasi mengambil data dari sistercity daerah IHK yaitu Kota Bogor. □ Untuk triwulan I tahun 2021 (Januari s.d Maret 2021) tingkat inflasi di Kota Bogor dilihat dari data inflasi bulanan cenderung fluktuatif. Bulan Januari (0,19) Bogor urutan ke tiga inflasi di Jawa Barat bersama Kota Bekasi, sementara bulan Februari (0,24) tertinggi Inflasi diantara 7 Kota IHK di Jawa Barat, dan pada bulan Maret (0,06) urutan ke empat inflasi di Jawa Barat. Total Inflasi Triwulan 1 di Kota Bogor adalah 0,49 % yang di picu oleh kelompok mananan, minuman dan tembakau. Fluktuasinya harga pada triwulan I merupakan permasalahan tersendiri bagi perekonomian di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor harus melakukan upaya lebih optimal lagi terkait pengendalian inflasi di Kota Bogor. Karena akan berdampak berbagai indikator terkait dampak perubahan harga-harga komoditas barang dan jasa, seperti daya beli masyarakat, ketimpangan pendapatan, efisiensi ekonomi dan bisnis, penyerapan investasi, penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan dan berbagai indikator ekonomi serta kesejahteraan lainnya. Maka perbaikan tingkat inflasi berdampak cukup luas terhadap berbagai indikator perekonomian di Kota Bogor. Terlebih lagi menghadapi bulan Ramadhan hingga menjelang hari Raya Idul Fitri 1442 H, dikhawatirkan tingkat inflasi Triwulan ke II tahun 2021 akan tinggi. □ Secara tahunan, inflasi Kabupaten Bogor relatif lebih tinggi dibanding inflasi Provinsi Jawa Barat. Pada Januari – Maret 2021, selain dari kelompok makanan dan minuman, penyumbang inflasi Kabupaten Bogor bersumber dari komoditas daging sapi, daging ayam, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Namun inflasi kelompok ini masih dapat tertahan seiring beberapa komoditas yang mengalami deflasi (Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras). □ Responsibilitas TPID Kabupaten Bogor Menyikapi Situasi Pandemi Covid-19. Keanggotaan TPID mengembangkan kegiatan menjaga daya beli dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan menyesuaikan trend pasar serta pola konsumsi masyarakat. Momentum ini perlu dimanfaatkan TPID untuk mendorong efisiensi dan produktivitas lewat digitalisasi hulu dan hilir, utamanya sektor pangan dan UMKM. a) Keterjangkauan Harga 1. Stimulus ekonomi berupa bansos untuk masyarakat dari APBN dan APBD. 2. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan untuk bahan pangan 3. Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang semakin meningkat b) Ketersediaan Pasokan 1. Pemenuhan kebutuhan logistik daerah yang terpapar Covid-19. 2. Cadangan Beras yang terus dijaga. 3. Pengawasan Bersama satgas pangan untuk menghindari penimbunan. 4. Pembatasan pembelian di tingkat ritel. c) Kelancaran Distribusi 1. Memastikan distribusi logistik lancar meskipun terdapat penerapan PSBB. 2. Pemanfaatan platform jual beli pangan online. 3. Rekayasa sistem logistik kerjasama dengan BUMD dan BULOG. 4. Mencoba melakukan Intervensi penyaluran pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit. d) Komunikasi Efektif 1. Pemantauan harga secara harian. 2. Pembentukan ekspektasi positif masyarakat dengan terus menyampaikan upaya menjaga ketersediaan bahan pangan. 3. Komunikasi belanja bijak dan tidak panic buying di berbagai daerah. 4. Optimalisasi jaringan TPID untuk berbagai informasi posisi surplus dan defisit komoditas. □ Titik kritis yang terjadi di Kabupaten Bogor setiap tahunnya dapat berubah dipengaruhi oleh pasokan komoditi baik dari dalam maupun dari luar daerah. Pasokan tersebut sangat dipengaruhi oleh jalur distribusi yang ada dan jalur distribusi ini sangat bergantung pada kondisi sarana dan prasarana transportasi, harga BBM, dan ketersediaan di daerah penghasil. Sedangkan jalur distribusi

dapat terganggu oleh faktor cuaca, dan pergeseran musim tanam dan dapat menjadi faktor yang mengakibatkan kenaikan harga.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

□ Antisipasi potensi kenaikan harga produk Daging Ayam dan Telur Ayam akibat dipicu oleh naiknya harga pakan dan DOC. □ Harga pakan naik karena terbatasnya ketersediaan beberapa bahan baku pakan yang masih impor diantaranya bahan aditif (Mineral/Vitamin) akibat kebijakan PSBB dimasa pandemi Covid-19 menyebabkan harga bahan aditif tersebut naik dan penggunaan jagung sebagai bahan pakan ternak mencapai 40% dari keseluruhan komposisi penyusun pakan ternak, khususnya unggas. Produksi jagung nasional belum stabil sementara impor dibatasi. □ Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2021. □ Kegiatan Operasi Pasar Murah sebagai antisipasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. □ Sinergi kegiatan pengendalian inflasi 2021.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Dengan melihat titik kritis yang terjadi di tahun 2020 maka Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menekan terjadinya inflasi yang tidak terkendali mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Kegiatan-kegiatan dimaksud terutama dilakukan pada bulan Januari untuk menekan atau menstabilkan harga beras yang sering kali terjadi kenaikan harga jika dibandingkan dengan harga di akhir tahun sebelumnya, menjelang Ramadhan dan pasca Idul Fitri serta menjelang tahun ajaran baru. Kegiatan tersebut antara lain adalah : a) Mendorong upaya optimalisasi program dan kegiatan pendukung pengendalian inflasi serta melakukan sinergitas antar perangkat daerah sehingga program dan kegiatan dapat lebih tepat sasaran dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor, b) Mengidentifikasi kendala utama dalam pengendalian inflasi serta solusi yang dapat dilakukan terutama mengenai distribusi dan pasokan pangan di Kabupaten Bogor serta penguatan basis data, c) Memasukan keterjangkauan/stabilisasi harga menjadi bagian dari panca karsa atau sebagai salah satu sasaran pembangunan dalam RPJMD dan RKPD yang disinergikan dengan RPJMN/RKP, d) Membuat roadmap pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor serta melaksanakan penghitungan nilai inflasi bulanan sehingga memudahkan dalam merumuskan rekomendasi program stabilisasi harga yang terstruktur dan rinci, e) Sosialisasi tentang pentingnya pengendalian inflasi sehingga dapat memacu perangkat daerah dalam menciptakan stabilitas atau menjaga keterjangkauan harga yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, f) Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja kelembagaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bogor. □ Di tengah Pandemi Covid-19, ketersediaan pangan menjadi hal yang krusial. Isu yang menjadi perhatian utama adalah distribusi kebutuhan pokok masyarakat dari sentra produksi ke pasar hingga konsumen. Bank Indonesia Jawa Barat bersama Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya melakukan antisipasi potensi peningkatan tekanan inflasi pada masa pemulihan ekonomi melalui strategi. □ Peran Lembaga perantara dalam distribusi pangan dengan memperkuat fungsi BUMD Pangan. □ Kerja sama antar daerah (KAD) untuk memperkuat ekspor-impor komoditas antar daerah. □ Optimalisasi fungsi pasar untuk distribusi barang dan menjaga stabilitas harga. □ Mendorong transaksi online melalui kerja sama dengan pasar tradisional dan e-commerce. □ Penguatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk memperluas akses informasi harga pangan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Monitoring Distribusi Bahan Pokok Dan Upaya Stabilisasi Harga. □ Pasokan Beras ke Wilayah Kabupaten Bogor □ Pasokan produksi beras Kabupaten Bogor tidak seluruhnya terserap oleh masyarakat Kabupaten Bogor kurang lebih 60% yang di jual ke luar Kabupaten Bogor Seperti Ke Wilayah Cianjur, DKI Jakarta dan Depok ; □ Kebutuhan Beras Kabupaten Bogor banyak di pasok dari daerah Karawang, Indramayu, Bekasi, Cianjur, Jawa Tengah dan Jawa Timur ; □ Beras biasanya di Salurkan Melalui Pedagang Grosir, Gapoktan dan Retail Mini Market ; □ Stok Beras saat ini mencukupi untuk kebutuhan sampai Hari Raya Idul Fitri 1442 H; □ Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai daerah penghasil beras yaitu di Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Sukamakmur yaitu Beras Carita Makmur yang merupakan salah satu program unggulan TPID Kabupaten Bogor. □ Pasokan terigu, minyak goreng, dan gula pasir ke Kabupaten Bogor □ Minyak goreng, terigu dan gula pasir di distribusikan melalui Distributor, Grosir, Pengecer, dan ada juga langsung ke Toko Retail Modern (Alfamart, Indomart) ; □ Umumnya para pedagang grosir ini mendapatkan pasokan dari luar Kabupaten Bogor melalui sales ataupun perorangan diluar wilayah Kabupaten Bogor yang mempunyai DO ke pabrik atau distributor utama dari produk-produk tersebut; □ Terigu, minyak goreng dan gula pasir dipasok dari wilayah DKI Jakarta, tangerang, Kota Bogor dan Banten ; □ Untuk saat ini Stok terigu, minyak goreng dan gula pasir mencukupi □ Kebutuhan Daging Sapi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H Kabupaten Bogor mencukupi. Apabila terjadi kekurangan akan dipasok dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan impor dari Australia.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Akan dilaksanakan kegiatan monitoring harga dan pasokan kebutuhan barang pokok strategis masyarakat di pasar secara periodik, □ Untuk menjamin keamanan pangan akan dilaksanakan kegiatan pengawasan Barang yang mengandung zat yang berbahaya, □ Akan dilaksanakan Bazar Murah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan, Bulog dan Distributor, □ Untuk mengantisipasi kenaikan harga akan dilaksanakan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Masyarakat (OPM KEPOKMAS) dan Gelar Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan komoditas Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Daging Sapi, Terigu, □ Jika terjadi potensi kelangkaan LPG 3 Kg, akan dilaksanakan Operasi Pasar LPG 3 Kg.